



**#JAGA** PANGAN  
MASA DEPAN

# LAPORAN TAHUNAN

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
**TAHUN 2022**

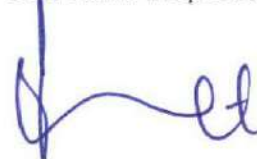
# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik. Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka Inspektorat Jenderal secara periodik menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi anggaran.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022. Besar harapan kami bahwa Laporan Tahunan ini dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan Inspektorat Jenderal di tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2023  
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Tin Latifah, SP, M.Si



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
BAB II .....	3
ORGANISASI DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL .....	3
A. Organisasi .....	3
B. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal .....	6
C. Peran Inspektorat Jenderal .....	8
BAB III .....	9
PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. Visium .....	9
B. Arah Pengawasan .....	12
C. Tujuan Pengawasan .....	12
D. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal .....	14
E. Program Kegiatan Pengawasan .....	14
F. Anggaran Inspektorat Jenderal .....	15
BAB IV .....	18
KINERJA ANGGARAN DAN KEGIATAN .....	18
A. Capaian Anggaran Inspektorat Jenderal .....	18
B. Capaian Anggaran dan Output lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi .....	22
1. Inspektorat I .....	22
2. Inspektorat II .....	22
3. Inspektorat III .....	23
4. Inspektorat IV .....	24
5. Inspektorat Investigasi .....	24

<b>C. Capaian Anggaran dan Output lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal .....</b>	<b>25</b>
1. Bagian Umum .....	25
2. Kelompok Perencanaan dan Evaluasi.....	28
3. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat .....	32
4. Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan.....	37
<b>BAB VI .....</b>	<b>42</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>43</b>
1. Daftar Pegawai Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	43
2. Rekap Penugasan pada Inspektorat I.....	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, dengan tugas dan fungsi pengawasan internal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian No.40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.

Inspektorat Jenderal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2022 difokuskan untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian dalam mencapai target RPJMN 2020 – 2024 meliputi: (1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Berkualitas; (2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; (4) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Dukungan yang diberikan antara lain mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan dan kekurangan, sehingga diperlukan laporan tahunan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan pemangku kepentingan di masa mendatang.



## **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Laporan Tahun 2022 ini adalah:

1. Memberikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Memberikan masukan kepada penanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan sehingga meningkatkan kinerja tahun berikutnya.
3. Untuk mengetahui berbagai permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Tahunan ini meliputi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2022.

## **BAB II**

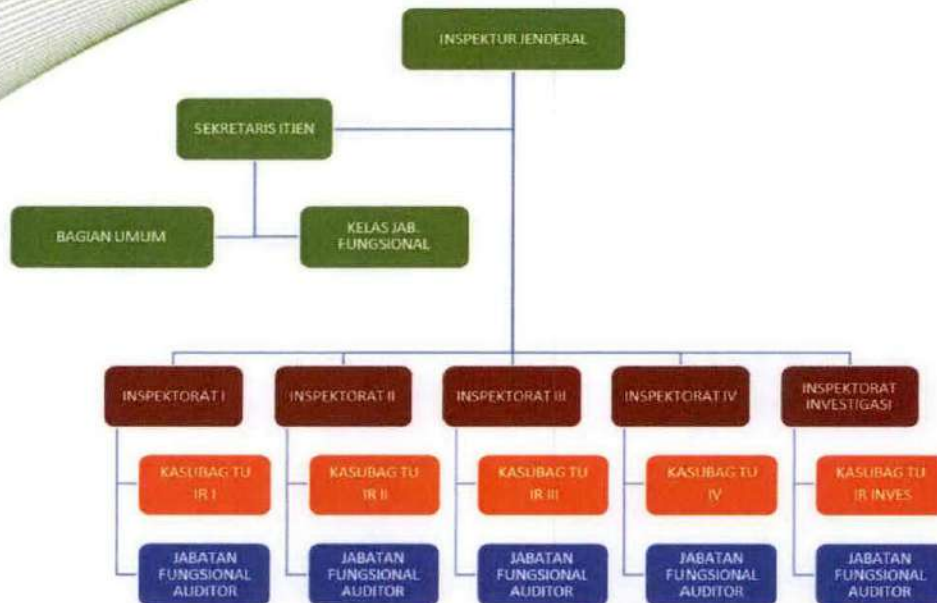
### **ORGANISASI DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL**

#### **A. Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, maka dalam melaksanakan fungsinya Inspektorat Jenderal memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

## 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- koordinasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
- koordinasi, pengelolaan data dan pemantauan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

### a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan tata usaha, serta penatausahaan barang milik negara dan rumah tangga.

### b. Kelompok Jabatan Fungsional



## **2. Inspektorat I, II, III, IV**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat I, II, III, IV mempunyai fungsi a) penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran; b) penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern; c) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya; d) penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e) pelaksanaan urusan tata usaha.

Inspektorat I melaksanakan pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Inspektorat II melaksanakan pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Inspektorat III melaksanakan pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan; dan Inspektorat IV melaksanakan pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

## **3. Inspektorat Investigasi**

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Investigasi mempunyai fungsi a) penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran; b) penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan pencegahan korupsi; c) pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya; d) pengelolaan pengaduan masyarakat; e) pelaksanaan upaya pencegahan korupsi; f) penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan g) pelaksanaan urusan tata usaha.

Untuk mendukung tata laksana organisasi lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi, penyelenggaraan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja didukung oleh:

1. Subbagian Tata Usaha

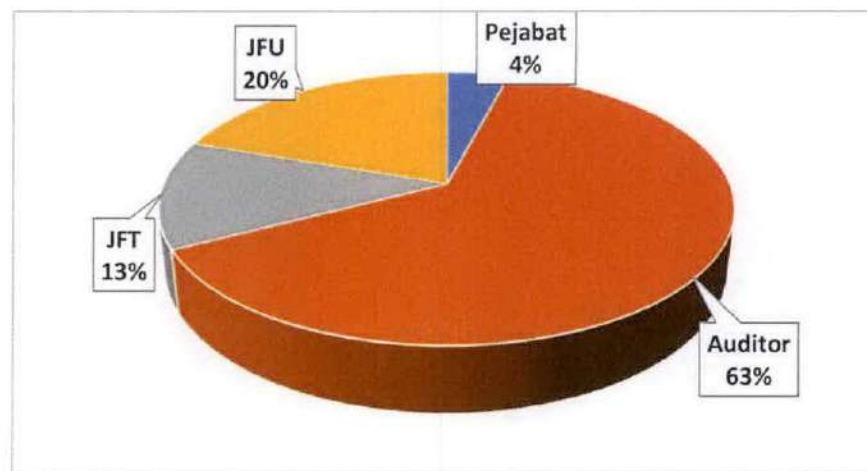
Subbagian Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi.

## B. Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal

Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal posisi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 288 orang dengan proporsi terbesar adalah SDM Pengawasan (Fungsional Auditor) 63%, dengan rincian sebagai berikut:

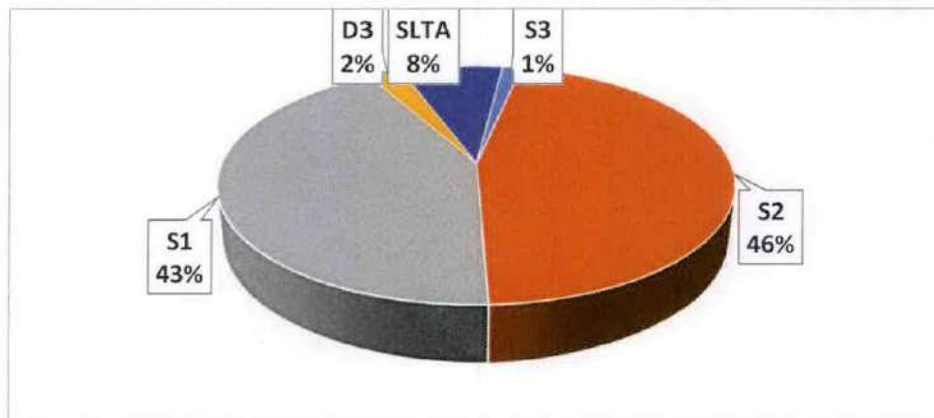


Gambar 2. Proporsi Pegawai Berdasarkan Jabatan

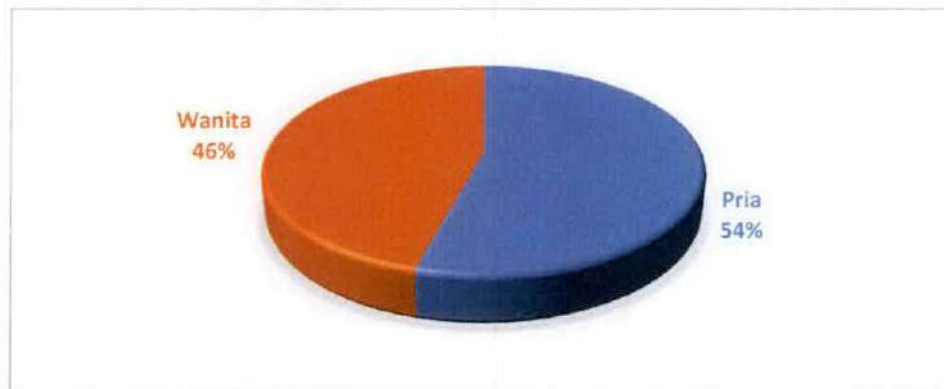
Berdasarkan latar belakang pendidikan, 89,97% SDM Inspektorat Jenderal khususnya PNS berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana (S1, S2, dan S3).



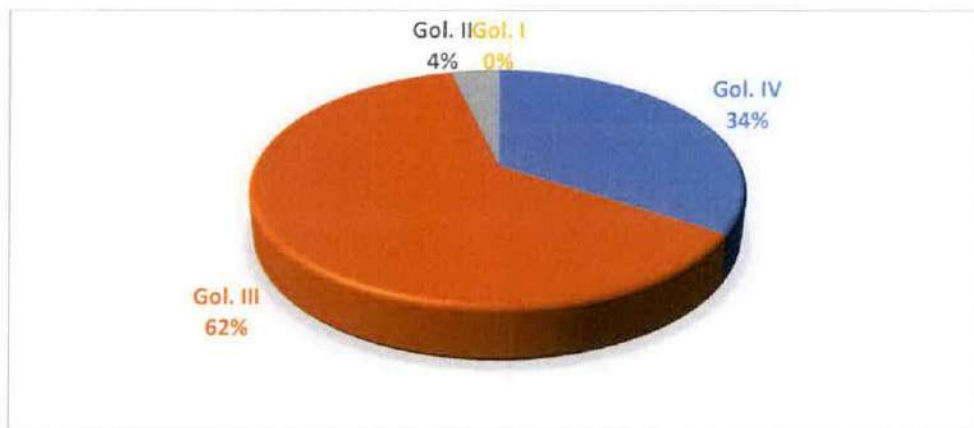
Hal ini menunjukkan bahwa SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian cukup berkualitas dengan dominasi pendidikan sarjana. Proporsi SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersaji pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Sebaran Pegawai Itjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Pegawai Itjen Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 5. Pegawai Itjen Berdasarkan Golongan

### C. Peran Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal independen yang memiliki peran sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan menjadi "mitra pro-aktif" dan terpercaya dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah. Inspektorat Jenderal berperan sebagai "consulting partner" yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, serta sebagai *catalysator* yaitu mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good government*) di seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu, peran aktif Inspektorat Jenderal sebagai "*quality assurance*" dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian telah dilakukan sesuai peraturan dan menerapkan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien.



## **BAB III**

### **PERENCANAAN KINERJA**

---

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2022.

#### **A. Visium**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/KPTS/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

#### **Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern dan terkini berbasis kawasan pertanian.

Untuk mendukung visi Kementerian Pertanian serta arahan Menteri Pertanian tersebut, maka Visium yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama lima tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Tugas dan fungsi pengawasan akan semakin optimal jika dilaksanakan secara terpadu sinergi dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Sinergi Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, BPKP, BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) Melalui Jaga Pangan Jaga Masa Depan yang merupakan sebuah inisiatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system*.

Kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN yang dirangkum dalam tagline "Jaga Pangan Jaga Masa Depan":

Berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas;

- a. Membangun sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- b. Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
- c. Membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat;
- d. Membangun kemitraan strategis dengan *stakeholder* pertanian.

Pada tahun 2022, penguatan kebijakan Jaga Pangan telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengawalan komoditas strategis pertanian di wilayah perbatasan dan wilayah terluar Indonesia pada 10 Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara (Kab. Talaud), Prov. NTT (Kab. Belu dan Rote Ndao), Prov. Kalimantan Barat (Kab. Sanggau), Prov. Aceh (Kab. Sabang), Prov. Kaltara (Kab. Nunukan), Prov. Maluku (Kab. Maluku Barat Daya), Prov. Papua



(Kab. Merauke), Prov. Kalimantan Timur (Kota Balikpapan dan Kab. Panajam Paser Utara), Prov. Lampung (Kab. Lampung Tengah), dan Prov. Banten (Kota Serang dan Cilegon).

Selain itu kegiatan berupa apel perkarantinaaan dan PMK, Rakorwas bidang ketahanan pangan serta monev melalui dialog Jaga Pangan untuk memastikan ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Peran Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dalam visinya yaitu:

### **Menjadi Mitra Miyatani dalam mengawal Pengelola Program Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern**

Penjabaran dan definisi visium Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

*Tabel 1. Visium Inspektorat Jenderal*

Uraian	Definisi
Mitra	Teman atau sahabat, hal ini bermaksud bahwa Inspektorat Jenderal dianggap sebagai teman dalam kedudukan yang setara bagi pelaksana program pembangunan pertanian. Visi ini diturunkan ke dalam paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai <i>Quality Assurance dan Consultative Partner</i> .
Miyatani	Berasal dari bahasa sansekerta yang berarti dipercaya, yang dimaksud bahwa dengan kapabilitas SDM Itjen yang meningkat serta pemanfaatan teknologi informasi, maka Itjen sebagai APIP dianggap andal, profesional dan dan berintegritas;
Pengelola Program Pembangunan Pertanian	Seluruh pejabat dan penanggung jawab program dan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Maju	Menjadikan pertanian yang terus bergerak ke depan, memiliki aksi dan dinamika perubahan terus menerus kepada sesuatu yang lebih baik

Mandiri

Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat

Modern

Terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Era revolusi industri 4.0, Pertanian harus sudah memanfaatkan teknologi mutakhir

## B. Arah Pengawasan

Visium Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 diatas diwujudkan melalui 3 (tiga) Misi sebagai bentuk pencapaian Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern, meliputi:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Dalam menerapkan Misi Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mendukung Pengelolaan Kementerian Pertanian yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Arah Pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Program Pembangunan Pertanian;
2. Mewujudkan penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai wewenang Inspektorat Jenderal;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

## C. Tujuan Pengawasan

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:



1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pertanian yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi:

1. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan;
2. Pengawasan untuk tujuan tertentu meliputi audit investigasi dan audit tujuan tertentu;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian Pertanian, reviu atas laporan kinerja Kementerian Pertanian, reviu RKA-K/L, Reviu PAPBJ, Reviu HPS, dan Reviu RK-BMN, dan lain-lain;
4. Pengawasan dalam rangka pembinaan implementasi SPIP pada Instansi Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, seperti evaluasi atas SPIP, evaluasi atas penggunaan Dana Kantor Pusat/Kantor Daerah/Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
6. Pemantauan aktivitas rutin yang digunakan untuk mengelola kegiatan Pengawasan Intern serta Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) menggunakan proses, alat, dan informasi yang dianggap perlu dalam mengevaluasi kesesuaian terhadap Kode Etik dan Standar.

#### D. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Untuk mengukur pencapaian Visium, Misi, dan Tujuan, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, berikut dapat dilihat Perjanjian Kinerja pada tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis		Perjanjian Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1.1	Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal	Nilai	33,16
		1.2	Level Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal	Level	3,00
		1.3	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian	Level	3,00
		1.4	Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	%	80,00%
		1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementan	%	85,00%
		1.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementan	%	80,00%
2	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	2.1	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal	Nilai	86,00

#### E. Program Kegiatan Pengawasan

Program/kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020–2024 difokuskan pada Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima serta Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dikemukakan sebagai berikut:



1. Terwujudnya Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, meliputi:
  - a. Nilai PMPRB Inspektorat Jenderal;
  - b. Level *Internal Audit Capability Model (IACM)* Inspektorat Jenderal;
  - c. Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian;
  - d. Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Kementerian Pertanian terhadap total Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian;
  - e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti unit eselon I terhadap total rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementan;
  - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti di lingkup Kementan.
2. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, yaitu: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Jenderal.

## **F. Anggaran Inspektorat Jenderal**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran awal senilai Rp97.677.527.000,00. Pada tanggal 20 Oktober 2022, Inspektorat Jenderal merealokasi anggaran sebesar Rp217.436.441,00 untuk pemenuhan belanja pegawai unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian, sehingga anggaran Inspektorat Jenderal yang semula sebesar Rp97.677.527.000,00 menjadi sebesar Rp97.460.090.000,00.

Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2022 yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 2 (dua) kegiatan, meliputi:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal,
2. Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan kegiatan tersebut difasilitasi melalui anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2022, sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3. Pagu Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
51	Belanja Pegawai	22.895.923.000,00
52	Belanja Barang	71.564.167.000,00
53	Belanja Modal	3.000.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>97.460.090.000,00</b>

Tabel 4. Pagu Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
018.02.WA	Program Dukungan Manajemen	97.460.090.000,00
1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Itjen	<b>44.661.228.000,00</b>
4578	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementerian Pertanian	52.798.862.000,00
	<b>Total</b>	<b>97.460.090.000,00</b>

Tabel 5. Pagu Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output/Fisik
<b>018.02.WA.Program Dukungan Manajemen</b>		<b>97.460.090.000,00</b>	<b>625</b>
<b>1760.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Itjen</b>		<b>44.661.228.000,00</b>	<b>110</b>
1760.EBA. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	2.359.150.000,00	24
1760.EBA. Layanan Umum	Layanan	5.401.936.000,00	24
1760.EBA. Layanan Data dan Informasi	Layanan	1.875.666.000,00	12
1760.EBA. Layanan Perkantoran	Layanan	28.116.312.000,00	24
1760.EBB.Layanan Sarana Internal	Unit	3.000.000.000,00	2
1760.EBD.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	3.133.515.000,00	12
1760.EBD.Layanan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	774.649.000,00	12
<b>4578.Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementan</b>		<b>52.798.862.000,00</b>	<b>515</b>
<b>INSPEKTORAT I</b>	Laporan	<b>10.750.415.000,00</b>	<b>118</b>
010.Rekomendasi Hasil Audit pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	3.567.828.000,00	51
011. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	1.450.596.000,00	24
012. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	155.856.000,00	4
013. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan RKAKL Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	938.883.000,00	27
015. Layanan Audit Internal Inspektorat I	Laporan	4.637.252.000,00	12



Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Target Output/Fisik
<b>INSPEKTORAT II</b>	Laporan	<b>11.673.804.000,00</b>	<b>98</b>
016. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	3.572.028.000,00	50
017. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	1.090.572.000,00	18
018. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	78.376.000,00	2
019. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	449.612.000,00	16
021. Layanan Audit Internal Inspektorat II	Laporan	6.483.216.000,00	12
<b>INSPEKTORAT III</b>		<b>11.542.119.000,00</b>	<b>114</b>
022. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	3.567.828.000,00	51
023. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	1.450.596.000,00	24
024. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	107.964.000,00	3
025. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	820.038.000,00	24
027. Layanan Audit Internal Inspektorat III	Laporan	5.595.693.000,00	12
<b>INSPEKTORAT IV</b>		<b>11.501.271.000,00</b>	<b>114</b>
028. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	3.548.928.000,00	51
029. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	1.440.096.000,00	24
030. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	88.764.000,00	3
031. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	438.120.000,00	24
033. Layanan Audit Internal Inspektorat IV	Laporan	5.985.363.000,00	12
<b>INSPEKTORAT INVESTIGASI</b>	Laporan	<b>7.331.253.000,00</b>	<b>71</b>
034. Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	Laporan	2.516.405.000,00	59
035. Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	Laporan	4.814.848.000,00	12

## **BAB IV**

### **KINERJA ANGGARAN DAN KEGIATAN**

Sesuai DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA 2022 Nomor SP DIPA-018.02.1.238247/2022 tanggal 17 November 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mendukung Program Dukungan Manajemen dengan sasaran strategis program berupa Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Kementerian Pertanian melalui Audit, Pengawasan SPIP, Evaluasi SAKIP, Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL, Audit Tujuan Tertentu, dan layanan audit internal lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi serta kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal melalui layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan umum, layanan data dan informasi, layanan perkantoran, layanan sarana internal, layanan perencanaan dan penganggaran, serta layanan pemantauan dan evaluasi. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan tersebut diukur berdasarkan capaian realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan.

#### **A. Capaian Anggaran Inspektorat Jenderal**

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp94.971.443.461,00 atau 97,45% dari pagu sebesar Rp97.460.090.000,00. Realisasi fisik/*output* sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 654 laporan atau 104,64% dari target fisik/*output* sebanyak 625 laporan.

Rincian realisasi anggaran per jenis belanja, dan kegiatan sebagaimana pada tabel 6 berikut ini:



Tabel 6. Capaian Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	22.895.923.000,00	21.134.386.762,00	92,31
52	Belanja Barang	71.564.167.000,00	71.046.764.215,00	99,28
53	Belanja Modal	3.000.000.000,00	2.790.292.484,00	93,01
	<b>Total</b>	<b>97.460.090.000,00</b>	<b>94.971.443.461,00</b>	<b>97,45</b>

Tabel 7. Capaian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Target Output	Realisasi Output	%
018.02.WA.Program Dukungan Manajemen		97.460.090.000,00	94.971.443.461,00	97,45	625	654	104,64
1760.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Itjen		44.661.228.000,00	42.440.710.623,00	95,03	110	110	100,00
1760.EBA. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	2.359.150.000,00	2.331.321.924,00	98,82	24	24	100,00
1760.EBA. Layanan Umum	Layanan	5.401.936.000,00	5.322.559.578,00	98,53	24	24	100,00
1760.EBA. Layanan Data dan Informasi	Layanan	1.875.666.000,00	1.829.709.351,00	97,55	12	12	100,00
1760.EBA. Layanan Perkantoran	Layanan	28.116.312.000,00	26.299.516.294,00	93,54	24	24	100,00
1760.EBB.Layanan Sarana Internal	Unit	3.000.000.000,00	2.790.292.484,00	93,01	2	2	100,00
1760.EBD.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	3.133.515.000,00	3.103.966.992,00	99,06	12	12	100,00
1760.EBD.Layanan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	774.649.000,00	763.344.000,00	98,54	12	12	100,00
4578.Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Kementan		52.798.862.000,00	52.530.732.838,00	99,49	515	544	105,63
INSPEKTORAT I	Laporan	10.750.415.000,00	10.691.406.318,00	99,45	118	127	107,63
010.Rekomendasi Hasil Audit pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	3.567.828.000,00	3.551.307.824,00	99,54	51	51	100,00
011. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP Satker lingkup Setjen, Ditjen	Laporan	1.450.596.000,00	1.447.736.217,00	99,80	24	28	116,67

Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Target Output	Realisasi Output	%
Hortikultura dan BPPSDMP							
012. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	155.856.000,00	150.648.200,00	96,66	4	4	100,00
013. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan RKAKL Eselon I lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura dan BPPSDMP	Laporan	938.883.000,00	933.271.410,00	99,40	27	32	118,52
015. Layanan Audit Internal Inspektorat I	Laporan	4.637.252.000,00	4.608.442.667,00	99,38	12	12	100,00
<b>INSPEKTORAT II</b>	Laporan	<b>11.673.804.000,00</b>	<b>11.652.035.157,00</b>	<b>99,81</b>	<b>98</b>	<b>105</b>	<b>107,14</b>
016. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	3.572.028.000,00	3.566.885.268,00	99,86	50	51	102,00
017. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	1.090.572.000,00	1.089.529.930,00	99,90	18	21	116,67
018. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	78.376.000,00	78.255.800,00	99,85	2	2	100,00
019. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen TP dan Ditjen PSP	Laporan	449.612.000,00	449.177.500,00	99,90	16	19	118,75
021. Layanan Audit Internal Inspektorat II	Laporan	6.483.216.000,00	6.468.186.659,00	99,77	12	12	100,00
<b>INSPEKTORAT III</b>		<b>11.542.119.000,00</b>	<b>11.489.186.647,00</b>	<b>99,54</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>103,51</b>
022. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	3.567.828.000,00	3.559.461.565,00	99,77	51	52	101,96
023. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	1.450.596.000,00	1.447.254.766,00	99,77	24	24	100,00
024. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen	Laporan	107.964.000,00	106.094.700,00	98,27	3	3	100,00



Nama Output	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Target Output	Realisasi Output	%
Perkebunan, Balitbangtan dan BKP							
025. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Ditjen Perkebunan, Balitbangtan dan BKP	Laporan	820.038.000,00	807.583.323,00	98,48	24	27	112,50
027. Layanan Audit Internal Inspektorat III	Laporan	5.595.693.000,00	5.568.792.293,00	99,52	12	12	100,00
<b>INSPEKTORAT IV</b>		<b>11.501.271.000,00</b>	<b>11.437.176.293,00</b>	<b>99,44</b>	<b>114</b>	<b>121</b>	<b>106,14</b>
028. Rekomendasi Hasil Audit Kinerja pada Satker lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	3.548.928.000,00	3.537.351.834,00	99,67	51	51	100,00
029. Rekomendasi Hasil Pengawasan SPIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	1.440.096.000,00	1.437.597.960,00	99,83	24	27	112,50
030. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	88.764.000,00	86.446.500,00	97,39	3	3	100,00
031. Rekomendasi Hasil Reviu LK dan Reviu RKAKL lingkup Itjen, Ditjen PKH dan Barantan	Laporan	438.120.000,00	433.516.960,00	98,95	24	28	116,67
033. Layanan Audit Internal Inspektorat IV	Laporan	5.985.363.000,00	5.942.263.039,00	99,28	12	12	100,00
<b>INSPEKTORAT INVESTIGASI</b>	Laporan	<b>7.331.253.000,00</b>	<b>7.260.928.423,00</b>	<b>99,04</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>102,82</b>
034. Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	Laporan	2.516.405.000,00	2.500.518.338,00	99,37	59	61	103,39
035. Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi	Laporan	4.814.848.000,00	4.760.410.085,00	98,87	12	12	100,00

## B. Capaian Anggaran dan *Output* lingkup Inspektorat I, II, III, IV, dan Investigasi

Pelaksanaan Pengawasan pada satker lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp52.798.862.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.530.732.838,00 atau sebesar 99,49%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi, meliputi:

### 1. Inspektorat I

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.691.406.318,00 atau 99,45% dari pagu anggaran Rp10.750.415.000,00. Target *output* 118 laporan dan realisasi *output* 127 laporan atau 107,63%, dengan rincian seperti tabel 8 berikut:

Tabel 8. Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat I

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target		Realisasi		%
		Rp	Rp	%	Output	Output	Output	Output	
1	Audit	3.567.828.000	3.551.307.824	99,54	51	Laporan	51	Laporan	100,00
2	Pengawasan SPIP	1.450.596.000	1.447.736.217	99,80	24	Laporan	28	Laporan	116,67
3	Evaluasi SAKIP Es I	155.856.000	150.648.200	96,66	4	Laporan	4	Laporan	100,00
4	Reviu LK dan RKAKL Es I	938.883.000	933.271.410	99,40	27	Laporan	32	Laporan	118,52
5	Layanan Audit Internal Inspektorat I	4.637.252.000	4.608.442.667	99,38	12	Laporan	12	Laporan	100,00
JUMLAH		10.750.415.000	10.691.406.318	99,45	118	Laporan	127	Laporan	107,63

Output kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat I yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, dapat dilihat pada lampiran 2.

### 2. Inspektorat II

Realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.652.035.157,00 atau 99,81% dari pagu anggaran



Rp11.673.804.000,00, sedangkan target *output* 98 laporan dan realisasi *output* 105 laporan atau 107,14%, dengan rincian pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat II

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target	Realisasi		%	
		Rp	Rp	%	Output	Output	Output		
1	Audit	3.572.028.000	3.566.885.268	99,86	50	Laporan	51	Laporan	102,00
2	Pengawasan SPIP	1.090.572.000	1.089.529.930	99,90	18	Laporan	21	Laporan	116,67
3	Evaluasi SAKIP Es I	78.376.000	78.255.800	99,85	2	Laporan	2	Laporan	100,00
4	Reviu LK dan RKAKL Es I	449.612.000	449.177.500	99,90	16	Laporan	19	Laporan	118,75
5	Layanan Audit Internal Inspektorat II	6.483.216.000	6.468.186.659	99,77	12	Laporan	12	Laporan	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>11.673.804.000</b>	<b>11.652.035.157</b>	<b>99,81</b>	<b>98</b>	<b>Laporan</b>	<b>105</b>	<b>Laporan</b>	<b>107,14</b>

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat II yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, dapat dilihat pada lampiran 3.

### 3. Inspektorat III

Realisasi anggaran Inspektorat III sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.489.186.647,00 atau 99,54% dari pagu anggaran Rp11.542.119.000,00. Target *output* 114 laporan dan realisasi *output* 118 laporan atau 103,51%, dengan rincian pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat III

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target	Realisasi		%	
		Rp	Rp	%	Output	Output	Output		
1	Audit	3.567.828.000	3.559.461.565	99,77	51	Laporan	52	Laporan	101,96
2	Pengawasan SPIP	1.450.596.000	1.447.254.766	99,77	24	Laporan	24	Laporan	100,00
3	Evaluasi SAKIP Es I	107.964.000	106.094.700	98,27	3	Laporan	3	Laporan	100,00
4	Reviu LK dan RKAKL Es I	820.038.000	807.583.323	98,48	24	Laporan	27	Laporan	112,50
5	Layanan Audit Internal Inspektorat III	5.595.693.000	5.568.792.293	99,52	12	Laporan	12	Laporan	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>11.542.119.000</b>	<b>11.489.186.647</b>	<b>99,54</b>	<b>114</b>	<b>Laporan</b>	<b>118</b>	<b>Laporan</b>	<b>103,51</b>

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat III yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, dapat dilihat pada lampiran 4.

#### 4. Inspektorat IV

Realisasi anggaran Inspektorat IV sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.437.176.293,00 atau 99,44% dari pagu anggaran Rp11.501.271.000,00. Target *output* 114 laporan dan realisasi *output* 121 laporan atau 106,14%, dengan rincian pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat IV

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target	Realisasi			
		Rp	Rp	%	Output	Output	Output	Output	%
1	Audit	3.548.928.000	3.537.351.834	99,67	51	Laporan	51	Laporan	100,00
2	Pengawasan SPIP	1.440.096.000	1.437.597.960	99,83	24	Laporan	27	Laporan	112,50
3	Evaluasi SAKIP Es I	88.764.000	86.446.500	97,39	3	Laporan	3	Laporan	100,00
4	Reviu LK dan RKAKL Es I	438.120.000	433.516.960	98,95	24	Laporan	28	Laporan	116,67
5	Layanan Audit Internal Inspektorat IV	5.985.363.000	5.942.263.039	99,28	12	Laporan	12	Laporan	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>11.501.271.000</b>	<b>11.437.176.293</b>	<b>99,44</b>	<b>114</b>	<b>Laporan</b>	<b>121</b>	<b>Laporan</b>	<b>106,14</b>

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat IV yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, dapat dilihat pada lampiran 5.

#### 5. Inspektorat Investigasi

Realisasi anggaran Inspektorat Investigasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.260.928.423,00 atau 99,04% dari pagu anggaran Rp7.331.253.000,00. Target *output* 71 laporan dan realisasi *output* 73 laporan atau 102,82%, dengan rincian pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Rincian Anggaran dan *Output* Inspektorat Investigasi

No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu	Realisasi		Target	Realisasi			
		Rp	Rp	Rp	Output	Rp	Rp	Pagu	
1	Audit dengan Tujuan Tertentu	2.516.405.000	2.500.518.338	99,37	59	Laporan	61	Laporan	103,39



No	Jenis Kegiatan	Anggaran			Jumlah Output				
		Pagu Rp	Realisasi Rp	Rp	Target Output		Realisasi Rp	Pagu Rp	
2	Audit Internal Inspektorat Investigasi	4.814.848.000	4.760.410.085	98,87	12 Laporan		12 Laporan		100,00
JUMLAH		7.331.253.000	7.260.928.423	99,04	71 Laporan		73 Laporan		102,82

*Output* kegiatan tersebut dihasilkan melalui penugasan Inspektorat Investigasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, dapat dilihat pada lampiran 6.

### C. Capaian Anggaran dan *Output* lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tahun anggaran 2022, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp44.661.228.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.440.710.623,00 atau sebesar 95,03%. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang meliputi Kelompok Perencanaan dan Evaluasi; Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat (OKHH); Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan (DPLHP), dan Bagian Umum.

Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

#### 1. Bagian Umum

Bagian Umum terdiri dari Sub Kelompok Keuangan dan Tata Usaha dan Sub Kelompok BMN dan Rumah Tangga. Realisasi anggaran Bagian Umum sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp34.412.368.356,00 atau 94,23% dari pagu anggaran senilai Rp36.518.248.000,00. Target *output* 50 layanan/unit dan realisasi *output* 50 layanan/unit atau 100,00%, dengan rincian seperti tabel 13 berikut:

Tabel 13. Capaian Anggaran dan *Output* Bagian Umum

Kode	Kegiatan	Anggaran			Target	Output	
		Pagu	Realisasi	%		Realisasi	%
1760. EBA. 994	Layanan Perkantoran	28.116.312.000	26.299.516.294	93,54	24	24	100,00
1760. EBA. 962	Layanan Umum	5.401.936.000	5.322.559.578	98,53	24	24	100,00
	051. Pengelolaan Keuangan	1.114.671.000	1.102.543.500	98,91			
	052. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	4.287.265.000	4.220.016.078	98,43			
1760. EBB. 951	Layanan Sarana Internal	3.000.000.000	2.790.292.484	93,01	2	2	100,00
	052. Alat Pengolah Data dan Informasi	1.881.124.000	1.681.115.034	89,37			
	053. Fasilitas Perkantoran	2.319.151.000	2.310.976.728	99,65			

#### Kegiatan dari Bagian Umum

Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA. 2022 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp230.097.848,00 atau mencapai 1.533,99 persen dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp15.000.000,00. Realisasi Belanja Negara Tahun 2022 adalah senilai Rp94.970.856.461,00 atau mencapai 97,45 dari alokasi anggaran senilai Rp97.460.090.000,00.



- c. Neraca TA. 2022 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan senilai Rp11.109.625.965,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp592.924.235,00 Aset Tetap (*netto*) senilai Rp10.208.689.595,00, dan Aset Lainnya (*netto*) senilai Rp308.012.135,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp70.503.283,00 dan Rp11.039.122.682,00.
- d. Laporan Operasional (LO) TA 2022 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00, sedangkan jumlah Beban Operasional senilai Rp96.906.934.342,00 sehingga Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp96.906.934.342,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp280.797.848,00 dan nihil, sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp96.626.136.494,00.
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2022 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah Rp12.899.141.888,00 ditambah Defisit-LO senilai Rp96.626.136.494,00 dikurang koreksi aset non revaluasi senilai Rp76.792.760,00 serta ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp94.842.910.048,00 sehingga terdapat Penurunan Ekuitas senilai Rp1.860.019.206,00 dan menghasilkan Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp11.039.122.682,00.
- f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2022 menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam

CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian LRA untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan menggunakan Basis Kas, sedangkan Neraca, LO, dan LPE untuk TA 2022 disusun dan disajikan dengan Basis Akrual.

CaLK Tahun 2022 telah mengungkapkan transaksi terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

## 2. Kelompok Perencanaan dan Evaluasi

Realisasi anggaran Kelompok Perencanaan dan Evaluasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.867.310.992,00 atau 98,95% dari pagu anggaran Rp3.908.164.000,00, realisasi *output* 12 dokumen atau 100,00% dari target *output* 12 dokumen, dengan rincian seperti tabel 14 berikut:

Tabel 14. Capaian Anggaran dan Output Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Kode	Kegiatan	Anggaran			Target	Output	
		Pagu	Realisasi	%		Realisasi	%
1760. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.133.515.000,00	3.103.966.992,00	99,06	12	12	100,00
	053. Penyusunan Rencana Program	313.952.000,00	309.700.000	98,65			
	054. Penyusunan Rencana Anggaran	2.819.563.000,00	2.794.266.992,00	99,10			
1760. EBD. 953	Layanan Monitoring dan Evaluasi	774.649.000	763.344.000	98,54	12	12	100,00

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang melekat pada anggaran Kelompok Perencanaan dan Evaluasi, meliputi:



#### a. Survei Kinerja Pengawasan

Tujuan evaluasi kinerja pengawasan adalah mengukur tingkat keberhasilan kinerja program/kegiatan pengawasan intern yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada UPT maupun Dinas yang membidangi pertanian tahun 2022. Kegiatan evaluasi ini menggunakan instrumen survei dengan responden pejabat struktural, pengelola anggaran, maupun fungsional pada dinas kabupaten/kota yang membidangi pertanian.

Tahun 2022 Inspektorat Jenderal melaksanakan survei kinerja pengawasan yang meliputi 2 (dua) tahap di 8 (delapan) provinsi/kabupaten yaitu tahap I dilaksanakan tanggal 18 s.d. 22 April 2022, dengan lokasi Banten, Jawa Barat (Bandung, Karawang, Subang, Bogor), dimana kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal mendapat penilaian yang baik dengan skor 3,35 atau 83,81% dari pencapaian tertinggi yaitu skor sebesar 4; sedangkan tahap II dilaksanakan tanggal 12 s.d. 15 Desember 2022, dengan lokasi Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Tengah, dimana kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal mendapat penilaian yang baik dengan skor 3,41 atau 85,15% dari pencapaian tertinggi yaitu skor sebesar 4.

#### b. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021 – 2022

Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Tujuan dari Stranas PK adalah sebagai berikut: 1) memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi; 2) mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) bukan hanya luaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur; dan 3) meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menteri, Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya yang terkait menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PK kepada Timnas PK setiap 3 (tiga) bulan sekali. Timnas PK menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas PK kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Fokus Stranas PK meliputi: 1) Perizinan dan tata niaga; 2) Keuangan negara; dan 3) penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan pelaporan Aksi Stranas PK tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai *focal point* telah melakukan monitoring lingkup Kementerian Pertanian. Aksi Stranas PK di Kementerian Pertanian telah mencapai 61,6% yang terdiri dari fokus I Perizinan dan Tata Niaga mencapai 59,6%, Fokus II Keuangan Negara mencapai 57,3 dan Fokus III Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi mencapai 93,8%.

c. *Internal Audit Capability Model (IACM)*

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level *tingkat kapabilitas APIP*.

Hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, menyimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berada pada **Level 3** dengan **Skor 3,24** dengan uraian sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)			
1	Pengelolaan SDM	3	0,54
2	Praktik Profesional	3	0,63
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,19
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5	Struktur Tata Kelola	3	0,40
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )			
6	Peran dan Layanan	3	1,30
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3</b>	<b>3,24</b>



Simpulan atas 6 (enam) elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 6 (enam) elemen dan 19 (sembilan belas) topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus.

d. Monitoring Penerbitan Laporan

Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau tim telah selesai melaksanakan tugasnya. Laporan merupakan bentuk komunikasi antara pelaksana tugas dengan pemberi tugas untuk mengetahui apakah kegiatan yang ditugaskan telah dilaksanakan dengan baik. Laporan hendaknya cepat, akurat, dan lengkap serta mudah dipahami oleh pembacanya. Posisi perkembangan penerbitan laporan sampai dengan 31 Desember 2022 yang dipantau melalui aplikasi SIMWAS, dapat dilihat pada tabel 15 berikut:

Tabel 15. Penerbitan Laporan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Total ST	Laporan Terbit				Laporan Belum Terbit	
			Terbit	%	Tepat	Terlambat	Belum Terbit	%
1	Sekretariat	550	468	85,09	206	262	82	14,91
a	Renev	138	128	92,75	27	101	10	7,25
b	Umum	124	119	95,97	98	21	5	4,03
c	OKHH	96	85	88,54	15	70	11	11,46
d	DPLHP	83	83	100,00	59	24	0	0,00
e	Lainnya	109	53	48,62	7	46	56	51,38
2	Ins. I	479	479	100,00	136	343	0	0,00
3	Ins. II	522	521	99,81	169	352	1	0,19
4	Ins. III	436	436	100,00	299	137	0	0,00
5	Ins. IV	419	419	100,00	200	219	0	0,00
6	Ins. Invest.	324	39	12,04	4	35	285	87,96
	<b>Total</b>	<b>2.730</b>	<b>2.362</b>	<b>86,52</b>	<b>1.014</b>	<b>1.348</b>	<b>368</b>	<b>13,48</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah surat penugasan sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 2.730 penugasan. Dari 2.730 penugasan telah terbit laporan sebanyak 2.362 laporan atau 86,52%, sedangkan laporan belum terbit sebanyak 368 laporan atau 13,48%.

Laporan terbit terdiri dari laporan terbit tepat waktu sebanyak 1.014 laporan atau 37,14% dan laporan terbit terlambat sebanyak 1.348 laporan atau 49,37% serta laporan belum terbit 368 laporan atau 13,48%.

### 3. Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat

Realisasi anggaran Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat (OKHH) sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp2.331.321.924,00 atau 98,82% dari pagu anggaran 2.359.150.000,00, sedangkan target *output* 24 layanan dan realisasi *output* 24 laporan atau 100%, dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Anggaran dan Output Kelompok OKHH

Kode	Kegiatan	Anggaran			Target	Output	
		Pagu	Realisasi	%		Realisasi	%
1760. EBA. 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.359.150.000	2.331.321.924	98,82	24	24	100,00
	051. Pengelolaan Kepegawaian	1.584.723.000	1.569.131.700	99,02			
	052. Pengelolaan Hukum, Humas dan Protokol	774.427.000	762.190.224	98,42			

Kegiatan Inspektorat Jenderal yang melekat pada anggaran Kelompok Organisasi, Kepegawaian, Hukum dan Hubungan Masyarakat, meliputi:

#### a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 17. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Tanggal	Peserta	Pelaksanaan Kegiatan
1	Pelatihan penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	16 – 22 April 2022	3 orang	BPKP
2	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer di Lingkungan Itjentan	9 – 14 Mei 2022	60 orang	BPKP
3	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer Batch	17 - 20 Mei 2022	1 orang	BPKP
4	Diklat Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	6 – 8 Juni 2022	1 orang	BPKP
5	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA)	6 – 8 Juni 2022	1 orang	BPKP
6	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP)	1-19 Juni 2022	1 orang	BPKP
7	Pelatihan Sertifikasi Big Data Analist	6 – 8 Juni 2022	1 orang	BPKP
8	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO)	5 - 10 Juni 2022	1 orang	BPKP



No	Uraian	Tanggal	Peserta	Pelaksanaan Kegiatan
9	Pelatihan Penilaian Kapabilitas APIP	16-23 Juli 2022	1 orang	BPKP
10	Diklat Audit Investigatif	8 – 12 Agustus 2022	25 orang	PPMKP
11	Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2022	15 Agustus – 30 September 2022	1 orang	BAPPENAS
12	DIKLAT PKN Tk. II Angkatan XX Tahun 2022	2 Agustus – 24 November 2022	1 orang	PPMKP
13	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi Batch VI	10-16 September 2022	1 orang	BPKP

b. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Tabel 18. Kegiatan Bimbingan Teknis

No	Uraian	Tanggal	Peserta	Pelaksanaan Kegiatan
1	Bimtek Pengajuan DUPAK secara online melalui aplikasi SIBIJAK bagi Auditor Gol. IV/a kebawah	25 Februari 2022	17 orang	Itjen
2	Bimtek Pelaksanaan Anggaran TA 2022	9-11 Maret 2022	1 orang	Itjen
3	Bimtek bagi Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Kementan	25 Maret 2022	20 orang	Itjen
4	Bimtek Penyusunan Program Pelayanan Informasi dan Kehumasan	17 Juni 2022	10 orang	Itjen
5	Bimtek Pengajuan DUPAK secara online melalui aplikasi SIBIJAK bagi Auditor Gol. IV/a kebawah	30 Juni 2022	38 orang	Itjen
6	Bimtek Aplikasi Srikandi	13 Juli 2022	18 orang	Itjen
7	Bimtek Penyiapan Bahan Pembinaan Disiplin Pegawai lingkup Itjentan	16 September 2022	11 orang	Itjen
8	Bimtek Evaluasi Budaya Kerja Lingkup Itjentan	30 September 2022	15 orang	Itjen

c. Penilaian Karya Tulis Ilmiah tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu:

- 1) Pengujian Karya Tulis Ilmiah periode Juni 2022 sebanyak 11 artikel yang memenuhi syarat seluruhnya untuk diajukan sebagai dupak.
- 2) Pengujian Karya Tulis Ilmiah periode Desember tahap I tahun 2022 sebanyak 10 artikel, memenuhi syarat semuanya untuk diajukan sebagai Dupak.
- 3) Pengujian Karya Tulis Ilmiah periode Desember tahap II tahun 2022 sebanyak 11 artikel, yang memenuhi syarat 8 untuk pengajuan

dupak dan 3 artikel tidak bisa diajukan dikarenakan nilai dibawah *passing grade*.

d. Penyusunan dan Pembuatan *Layout* Media Auditor sebanyak 3 edisi yaitu:

1) Edisi 59 Juni tahun 2022

Tema : Sinergi dan Kolaborasi Menjaga Ketahanan Pangan untuk Pertanian Maju Mandiri dan Modern.

2) Edisi 60 September tahun 2022

Tema :Optimalisasi Pengawasan untuk Menwujudkan Swasembada Pangan Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.

3) Edisi 61 Desember tahun 2022

Tema : Penguatan Pengawasan terhadap Capaian Kinerja Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian di daerah Perbatasan.

e. Pelaksanaan Evaluasi LAPOR!

Selama tahun 2022 jumlah pengaduan aplikasi LAPOR! sebanyak 50 pengaduan dan sampai akhir tahun 2022 seluruhnya telah ditindaklanjuti.

f. Penyusunan Desain dan Artikel Website

Tahun 2022 telah dilakukan penambahan fitur pada website: [itjen.pertanian@go.id](http://itjen.pertanian.go.id) antara lain : fitur 2 bahasa atau lebih dan fitur bagi disabilitas.

1) Fitur alih Bahasa







## 2) Fitur untuk Disabilitas

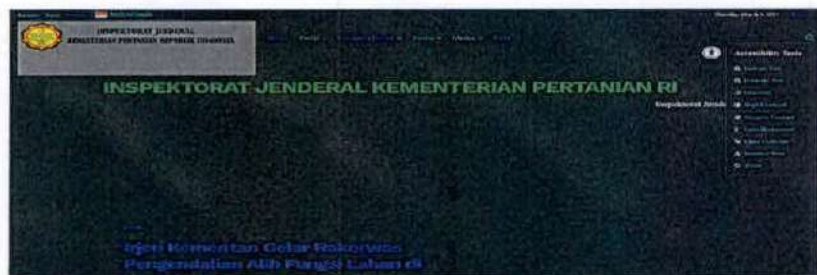
### a) Penambahan dan pengurangan ukuran font



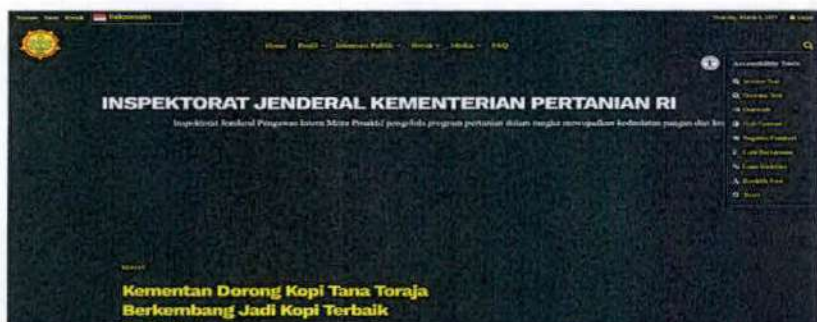
b) Ubah warna menjadi Grey/Abu-abu



c) Merubah warna website menjadi lebih kontras



d) Merubah warna website menjadi negative



e) Merubah background website menjadi satu warna (putih)





f) Memberikan garis bawah di hyperlink



g) Memperbesar ukuran font agar mudah dibaca



h) Penambahan halaman kalender kegiatan



g. Penyelenggaraan PPID

Tahun 2022 Inspektorat Jenderal mendapatkan peringkat 5 besar Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

#### 4. Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan

Realisasi anggaran Kelompok Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan (DPLHP) sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp1.829.709.351,00 atau 97,55% dari pagu anggaran 1.875.666.000,00.

Target *output* 12 layanan dan realisasi *output* 12 layanan atau 100,00%, dengan rincian seperti tabel 19 berikut:

Tabel 19. Capaian Anggaran dan Output Kelompok DPLHP

Kode	Kegiatan	Anggaran			Target	Output	
		Pagu	Realisasi	%		Realisasi	%
1760. EBA. 963	Layanan Data dan Informasi	1.875.666.000	1.829.709.351	97,55	12	12	100,00
	051. Layanan Data dan Informasi						

Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan terhadap seluruh laporan hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, BPKP dan BPK-RI. Tujuan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah untuk mendorong auditan (obyek pemeriksaan) untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi auditor yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan, baik yang berupa rekomendasi yang bersifat administratif, substansi teknis, ketatalaksanaan maupun rekomendasi kerugian negara untuk disetorkan ke Kas Negara. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dikemukakan sebagai berikut:

a. Hasil Pengawasan Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Tahun 2022 diketahui bahwa terdapat 12.553 kejadian dengan jumlah temuan kerugian negara senilai Rp377.614.894.882,49. Sampai dengan posisi 31 Desember 2022 telah ditindaklanjuti sebanyak 11.953 kejadian dengan nilai tindaklanjut senilai Rp339.345.867.395,02 dan masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 600 kejadian dengan nilai Rp38.269.027.487,47 atau 10,13%.

Berikut jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal secara rinci pada tabel 20 berikut:



Tabel 20. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementan

Kementerian Pertanian								
No.	Eselon I	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa		
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	%
1	SEKRETARIAT JENDERAL (01)	193	6.883.036.987,21	182	5.421.143.063,71	11	1.461.893.923,50	21,24
2	INSPEKTORAT JENDERAL (02)	14	171.261.429,00	10	120.561.429,00	4	50.700.000,00	29,60
3	DITJEN TANAMAN PANGAN (03)	1.326	130.262.427.873,85	1.223	114.426.355.214,76	103	15.836.072.659,09	12,16
4	DITJEN HORTIKULTURA (04)	2.120	30.058.025.457,92	1.969	23.864.728.493,00	151	6.193.296.964,92	20,60
5	DITJEN PERKEBUNAN (05)	398	48.844.108.959,50	240	42.844.910.086,11	158	5.999.198.873,39	12,28
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN (06)	1.925	56.459.910.266,92	1.848	54.204.896.852,33	77	2.255.013.414,59	3,99
7	DITJEN PSP (08)	834	29.438.022.626,88	802	25.622.257.100,08	32	3.815.765.526,80	12,96
8	BADAN LITBANG PERTANIAN (09)	2.605	38.427.678.002,34	2.561	35.907.692.821,14	44	2.519.985.181,20	6,56
9	BPPSDMP (10)	1.410	18.329.229.920,42	1.408	18.308.458.365,42	2	20.771.555,00	0,11
10	BADAN KETAHANAN PANGAN (11)	178	2.883.019.801,67	178	2.883.019.801,67	-	-	0,00
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN (12)	1.550	15.858.173.556,78	1.532	15.741.844.167,80	18	116.329.388,98	0,73
	Jumlah	12.553	377.614.894.882,49	11.953	339.345.867.395,02	600	38.269.027.487,47	
	%			95,22	89,87	4,78	10,13	

b. Hasil Pemeriksaan BPKP

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI diketahui bahwa terdapat 961 kejadian dengan jumlah temuan kerugian negara senilai Rp18.283.665.513,40. Sampai dengan posisi 31 Desember 2022 telah ditindaklanjuti sebanyak 937 kejadian dengan nilai tindaklanjuti senilai Rp16.265.697.415,81 dan masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 24 kejadian dengan nilai Rp2.017.968.097,59 atau 11,04%. Berikut jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPKP secara rinci pada tabel 21 berikut ini:

Tabel 21. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPKP

No.	Eselon I	Kementerian Pertanian						
		Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa		%
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	
1	SEKRETARIAT JENDERAL (01)	1	1.701.852.900,00	0	1.562.464.900,00	1	139.388.000,00	8,19
2	INSPEKTORAT JENDERAL (02)	0	-	0	-	0	-	0,00
3	DITJEN TANAMAN PANGAN (03)	284	7.802.207.420,80	266	6.698.623.882,30	18	1.103.583.538,50	14,14



4	DITJEN HORTIKULTURA (04)	3	225.174.609,03	0	142.817.321,94	3	82.357.287,09	36,57
5	DITJEN PERKEBUNAN (05)	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	0	-	0,00
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN (06)	0	-	0	-	0	-	0,00
7	DITJEN PSP (08)	4	767.960.272,00	3	84.300.000,00	1	683.660.272,00	89,02
8	BADAN LITBANG PERTANIAN (09)	4	40.640.000,00	4	40.640.000,00	0	-	0,00
9	BPPSDMP (10)	664	7.741.830.311,57	663	7.732.851.311,57	1	8.979.000,00	0,12
10	BADAN KETAHANAN PANGAN (11)	0	-	0	-	0	-	0,00
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN (12)	0	-	0	-	0	-	0,00
Jumlah		961	18.283.665.513,40	937	16.265.697.415,81	24	2.017.968.097,59	11,04
%				97,50	88,96	2,50		11,04

c. Hasil Pemeriksaan BPK RI

Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022 diketahui bahwa terdapat 174 kejadian dengan jumlah temuan kerugian negara senilai Rp90.972.497.837,70. Sampai dengan posisi 31 Desember 2022 telah ditindaklanjuti sebanyak 157 kejadian dengan nilai tindaklanjut senilai Rp68.892.141.403,98 dan masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 19 kejadian dengan nilai Rp22.085.356.433,73 atau 24,28%. Berikut jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK RI secara rinci pada tabel 22 berikut ini:

Tabel 22. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPK

Kementerian Pertanian									
No.	Eselon I	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa		%	
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SEKRETARIAT JENDERAL (01)	3	656.181.906,56	3	657681906,6	0	-	1.500.000,00	-0,23
2	INSPEKTORAT JENDERAL (02)	1	60.369.705,00	1	60.369.705,00	0		-	0,00
3	DITJEN TANAMAN PANGAN (03)	39	63.781.469.479	32	46.844.548.788	9		16.941.920.691	26,56
4	DITJEN HORTIKULTURA (04)	8	1.871.079.466,41	8	1.871.079.466,41	0		-	0,00
5	DITJEN PERKEBUNAN (05)	26	9.411.286.193,37	25	9.048.434.733,37	1		362.851.460,00	3,86
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN (06)	14	1.733.443.221,85	11	742.838.442,37	3		990.604.779,48	57,15
7	DITJEN PSP (08)	2	1.897.298.090,00	2	338.529.210,00	0		1.558.768.880,00	82,16
8	BADAN LITBANG PERTANIAN (09)	42	8.269.946.233,30	36	6.037.235.609,55	6		2.232.710.623,75	27,00



9	BPPSDMP (10)	32	1.935.643.659,45	32	1.935.643.659,45	0	-	0,00
10	BADAN KETAHANAN PANGAN (11)	3	304.809.512,19	3	304.809.512,19	0	-	0,00
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN (12)	4	1.050.970.370,71	4	1.050.970.370,71	0	-	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>174</b>	<b>90.972.497.837,70</b>	<b>157</b>	<b>68.892.141.403,98</b>	<b>19</b>	<b>22.085.356.433,73</b>	<b>24,28</b>
<b>%</b>				<b>90,23</b>	<b>75,73</b>	<b>10,92</b>	<b>24,28</b>	

d. Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi/Tujuan Tertentu

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Investigasi terhadap perkembangan penyelesaian temuan kerugian negara sampai bulan Desember 2022, dapat disampaikan bahwa terdapat 727 kejadian dengan jumlah temuan kerugian negara senilai Rp160.258.290.155,65. Sampai dengan posisi 31 Desember 2022 telah ditindaklanjuti sebanyak 627 kejadian dengan nilai tindaklanjut senilai Rp117.021.128.746,58 dan masih terdapat sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 100 kejadian dengan nilai Rp43.237.161.408,07 atau 26,98%. Secara rinci jumlah temuan kerugian negara hasil pemeriksaan audit Investigasi dan audit Tujuan Tertentu pada tabel 23 berikut ini:

Tabel 23. Rekapitulasi Temuan Kerugian Negara Hasil Audit Investigasi dan Audit Tujuan Tertentu

		Kementerian Pertanian						
No.	Eselon I	Temuan Awal		Tindak Lanjut		Sisa		%
		Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	Kej	(Rp)	
1	SEKRETARIAT JENDERAL (01)	8	2.483.409.417,66	4	739.328.904,00	4	1.744.080.513,66	70,23
2	INSPEKTORAT JENDERAL (02)	0	-	0	-	0	-	0,00
3	DITJEN TANAMAN PANGAN (03)	128	64.228.516.410,09	89	40.879.506.783,88	39	23.349.009.626,21	36,35
4	DITJEN HORTIKULTURA (04)	17	1.712.168.944,00	16	780.287.394,00	1	931.881.550,00	54,43
5	DITJEN PERKEBUNAN (05)	70	26.178.499.007,45	54	22.722.551.575,45	16	3.455.947.432,00	13,20
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN (06)	90	13.855.466.722,64	76	5.210.880.625,64	14	8.644.586.097,00	62,39
7	DITJEN PSP (08)	158	29.262.921.695,95	149	26.875.455.069,95	9	2.387.466.626,00	8,16
8	BADAN LITBANG PERTANIAN (09)	149	15.592.726.541,44	133	13.012.436.978,24	16	2.580.289.563,20	16,55
9	BPPSDMP (10)	54	1.792.280.387,25	53	1.648.380.387,25	1	143.900.000,00	8,03
10	BADAN KETAHANAN PANGAN (11)	4	240.075.000,00	4	240.075.000,00	-	-	0,00
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN (12)	49	4.912.226.028,17	49	4.912.226.028,17	-	-	0,00
Jumlah		727	160.258.290.154,65	627	117.021.128.746,58	100	43.237.161.408,07	
%				86,24	73,02	13,76	26,98	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

---

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2022 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian. Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2022. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang selalu berkembang, baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan anggaran yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal terus menerus meningkatkan kinerja, mulai dari pengembangan kompetensi SDM pengawasan, serta sistem dan kebijakan pengawasan yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mencapai hasil yang optimal dikarenakan adanya permasalahan yang dihadapi seperti perubahan struktur organisasi di Kementerian Pertanian yaitu Badan Ketahanan Pangan menjadi Badan Pangan Nasional dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian. Atas permasalahan tersebut, Inspektorat Jenderal terus mengupayakan penyelesaiannya sehingga diharapkan terdapat peningkatan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai hasil yang optimal pada tahun depan.